

PENGADILAN AGAMA BIMA LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2025 - Audited

Jl. Gatot Subroto No. 10

Mpunda – Kota Bima - Nusa Tenggara Barat

Telp. 0374-6191134

e-mail : info@pa-bima.go.id www.pa-bima.go.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BIMA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 - Audited

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto No. 10

Mpunda – Kota Bima - Nusa Tenggara Barat

Telp. 0374-6191134

e-mail : info@pa-bima.go.id website : www.pa-bima.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Bima adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Bima. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bima, 20 Januari 2026
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretaris,

ASRINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 197507042000031001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan.....	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca.....	7
III. Laporan Operasional.....	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
A.1. Dasar Hukum.....	12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bima	13
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	15
A.4. Basis Akuntansi	15
A.5. Dasar Pengukuran	16
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	25
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	25
B.2. Belanja	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	29
C.1. Aset Lancar.....	29
C.2. Aset Tetap	32
C.3. Aset Lainnya	36
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	37
C.6. Ekuitas.....	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	39
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	39
D.2. Beban Pegawai.....	39

D.3. Beban Persediaan.....	40
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	41
D.5. Beban Pemeliharaan	41
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	42
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	42
D.8. Beban Bantuan Sosial.....	43
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	43
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	44
D.11. Beban Lain-lain.....	44
D.12. Kegiatan Non Operasional.....	45
D.13. Pos Luar Biasa	45
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	46
E.1. Ekuitas Awal	46
E.2. Surplus (defisit) LO	46
E.3. Koreksi Yang menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Nilai Persediaan.....	46
E.4. Koreksi Nilai Persediaan	46
E.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	47
E.6. Transaksi Antar Entitas.....	47
E.7. Kenaikan/Penurunan Ekuitas	47
E.8. Ekuitas Akhir	47
F. Pengungkapan Penting Lainnya	47
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	47
F.2. Pengungkapan Lain-lain	48
.....	25
enkung	25
LAMPIRAN A.1	26
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara AkruaI	30
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara AkruaI	32

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember TA 2025 dan TA 2024	2
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024	3
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	19
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	21
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	22
Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi PNPB per 31 Desember TA 2025	25
Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNPB per 31 Desember TA 2025 dan 2024	25
Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025	26
Tabel 9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember 2024..	26
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024	27
Tabel 11 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024	27
Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024	28
Tabel 13 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024	29
Tabel 14 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024	29
Tabel 15 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	30
Tabel 16 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	30
Tabel 17 Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	31
Tabel 18 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2025 dan 2024	31
Tabel 19 Rincian Aset Tetap	32
Tabel 20 Rincian Saldo Tanah	32
Tabel 21 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	36
Tabel 22 Rincian Aset Lainnya.....	36
Tabel 23 Rincian Aset tak Berwujud.....	37
Tabel 24 Rincian Aset tak Berwujud.....	37
Tabel 24 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024	38
Tabel 26 Rincian Realisasi PNPB per 31 Desember TA 2025	39
Tabel 27 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024	39
Tabel 28 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024	40
Tabel 29 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024	41
Tabel 30 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024.....	41
Tabel 31 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024	42
Tabel 32 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	42
Tabel 33 Rincian Beban Bantuan Sosial	43
Tabel 34 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	43
Tabel 35 Rincian Beban Piutang tak Tertagih.....	44
Tabel 36 Rincian Beban Lain-lain	44
Tabel 37 Rincian Kegiatan Non Operasional	45
Tabel 38 Rincian Pos Luar Biasa	45
Tabel 39 Rincian Koreksi Nilai Persediaan.....	46

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

PENGADILAN AGAMA BIMA

Jl. Gatot Subroto No. 10 Mpunda Kota Bima - Nusa Tenggara Barat

Telp. 0374-6191134 e-mail : info@pa-bima.go.id web: pa-bima.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bima, 20 Januari 2026
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretaris

ASRINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 197507042000031001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3,245,599.

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Bima pada TA 2025 adalah sebesar Rp8,195,270,784 atau mencapai 99.16 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp8,264,825,000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025			TA 2024
	Anggaran/Estimasi	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	1,758,000	3,245,599	184.62	3,245,508
Belanja Negara	8,264,825,000	8,195,270,784	99.16	7,063,289,507

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2025 dan 2024.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp7,071,902,679 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp701,812; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp7,070,200,867; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp1,000,000.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp919,692,864 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp919,692,864 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp6,152,209,815; Jumlah Kewajiban dan ekuitas sebesar Rp7,071,902,679.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	TA 2025	TA 2024	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	701,812	1,735,438	(1,033,626)	(59.56)
Aset Tetap	7,070,200,867	7,124,151,872	(53,951,005)	(0.76)
Aset Lainnya	1,000,000	0	1,000,000	0
Jumlah Aset	7,071,902,679	7,125,887,310	(53,984,631)	(0.76)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	919,692,864	588,490	919,104,374	156,180.12
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban	919,692,864	588,490	919,104,374	156,180.12
Ekuitas				
Ekuitas	6,152,209,815	7,125,298,820	(973,089,005)	(13.66)
Jumlah Ekuitas	6,152,209,815	7,125,298,820	(973,089,005)	(13.66)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	7,071,902,679	7,125,887,310	(53,984,631)	(0.76)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3,245,448, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp9,193,279,289, sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(9,190,033,841).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus (defisit) sebesar Rp151 dan surplus (defisit) sebesar Rp0, sehingga entitas mengalami surplus (defisit)-LO sebesar Rp(9,190,033,690).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal Tahun 2025 adalah sebesar Rp7,125,298,820, dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar Rp(9,190,033,690) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8,216,944,685, dengan kenaikan ekuitas sebesar Rp(973,089,005) sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp6,152,209,815.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2025, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA BIMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A <i>Pendapatan Negara dan Hibah</i>	B.1				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	1,758,000	3,245,599	184.62	3,245,508
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		1,758,000	3,245,599	184.62	3,245,508
B. <i>Belanja Negara</i>	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	6,937,111,000	6,870,900,893	99.05	5,855,163,507
2. Belanja Barang	B.2.2.	1,106,444,000	1,106,210,491	99.98	1,208,126,000
3. Belanja Modal	B.2.3.	221,270,000	218,159,400	99.98	0
Jumlah Belanja Negara		8,264,825,000	8,195,270,784	99.16	7,063,289,507

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA BIMA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2025	TA 2024
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 3.	378,812	1,473,500
Persediaan	C.1. 4.	323,000	261,938
Jumlah Aset Lancar		701,812	1,735,438
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	3,538,955,000	3,538,955,000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2,624,507,120	3,331,870,125
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	4,224,343,200	4,224,343,200
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	5,348,929	5,348,929
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 6.	(3,322,953,382)	(3,976,365,382)
Jumlah Aset Tetap		7,070,200,867	7,124,151,872
Aset Lainnya	C.3		
Aset tak Berwujud	C.3. 1.	12,100,000	12,100,000
Aset lain-lain	C.3. 2.	950,441,905	0
Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya	C.3. 3.	950,441,905	(12.100.000)
Jumlah Aset Lainnya		1,000,000	0
Jumlah Aset		7,071,902,679	7,125,887,310
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang kepada pihak ketiga	C.4. 1.	919,692,864	588,490
Uang Muka Dari KPPN	C.4. 2.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		919,692,864	588,490
Jumlah Kewajiban		919,692,864	588,490
EKUITAS			
Ekuitas	C.5		
Ekuitas	C.5. 1.	6,152,209,815	7,125,298,820
Jumlah Ekuitas		6,152,209,815	7,125,298,820
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		7,071,902,679	7,125,887,310

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA BIMA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2025	TA 2024
Kegiatan Operasional			
<i>Pendapatan Operasional</i>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D. 1	3,245,448	3,245,448
Jumlah Pendapatan		3,245,448	3,245,448
<i>Beban Operasional</i>			
Beban Pegawai	D. 2	7,779,329,070	5,854,966,136
Beban Persediaan	D. 3	45,469,938	50,803,062
Beban Barang dan Jasa	D. 4	626,987,685	700,144,800
Beban Pemeliharaan	D. 5	397,086,090	364,275,000
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	48,376,601	91,701,000
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	296,029,905	260,918,562
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		9,193,279,289	7,322,808,560
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(9,190,033,841)	(7,319,563,112)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(defisit) pelepasan aset non Lancar		0	0
Surplus/(defisit) penyelesaian kewajiban Jangka panjang		0	0
Surplus/(defisit) dari kegiatan non Operasional lainnya		151	60
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(9,190,033,690)	(7,319,563,052)
<i>Pos Luar Biasa</i>			
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus/(defisit) dari pos luar Biasa		0	0
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		(9,190,033,690)	(7,319,563,052)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA BIMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2025	TA 2024
Ekuitas Awal	E. 1	7,125,298,820	7,357,337,873
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(9,190,033,690)	(7,319,563,052)
Koreksi Yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
Lain-lain			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	8,216,944,685	7,087,523,999
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	(973,089,005)	(232,039,053)
Ekuitas Akhir		6,152,209,815	7,125,298,820

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 90/PMMK.06/2014;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- q. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- r. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- s. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bima

Visi Pengadilan Agama Bima adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Bima yang profesional dan modern dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Misi Pengadilan Agama Bima adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan Mahkamah Agung RI;
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan;
3. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bima yang profesional, integritas dan bertaqwa;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern, efektif dan efisien;
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Bima melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Bidang Perkara

Peningkatan mutu pelayanan kepada pencari keadilan dalam menerima perkara, peningkatan proses persidangan pemeriksaan perkara, peningkatan kualitas putusan/penetapan, peningkatan mutu penyelesaian perkara, penyediaan layanan informasi mengenai jalannya tahapan-tahapan persidangan dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga bisa diakses secara umum demi terwujudnya keterbukaan informasi dalam bidang pelayanan penyelesaian perkara dengan mengembangkan sistem SIPP.

2. Bidang Pengawasan Internal

Meningkatkan mutu pengawasan terhadap perilaku dan kinerja hakim dan pejabat kepaniteraan baik yang bersifat rutin maupun insidentil, meningkatkan mutu pengawasan terhadap kinerja seluruh pegawai dan pejabat sekretariat baik yang bersifat rutin maupun insidentil.

3. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Kepegawaian

Meningkatkan mutu pelayanan dan kesejahteraan seluruh pegawai yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi dan mutasi, pemberian cuti, dan laporan kepegawaian.

4. Bidang Pengelolaan Keuangan

Meningkatkan mutu perencanaan dan realisaasi dalam bidang Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, dengan tetap berpegang kepada prinsip pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

5. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Meningkatkan mutu administrasi tata persuratan, meningkatkan mutu pengelolaan barang-barang inventaris kantor serta administrasi dan pemeliharaan, meningkatkan mutu kebersihan dan keamanan kantor, meningkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga lainnya.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Bima. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, Unaudited, dan Audited. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya

penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi

sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tata Cara Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp3,245,599

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3,245,599. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Bima adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,758,000	0	0
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	3,245,448	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	151	0
Total Pendapatan	1,758,000	3,245,599	184.62

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp91 dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	0	3,245,448	(3,245,448)	(100.00)
2.	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	3,245,448	0	3,245,448	0
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	151	60	91	151.67
Total Pendapatan		3,245,599	3,245,508	91	0

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp.
8,195,270,784*

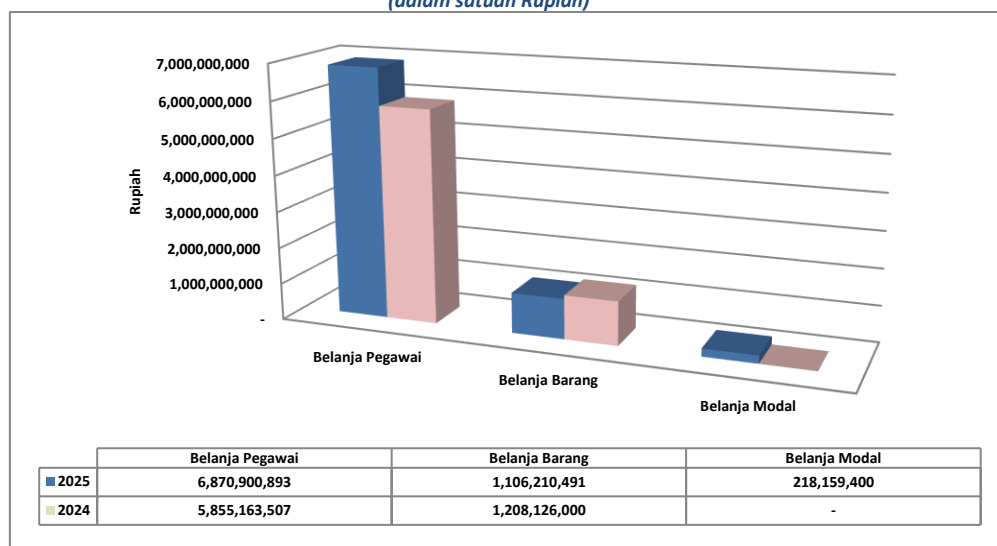
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Bima per 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp8,195,270,784 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99.16% dari anggaran senilai Rp8,264,825,000 dengan sisa anggaran tahun 2025 sebesar Rp69,554,216. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2025		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6,937,111,000	6,870,900,919	99.05
Belanja Barang	1,106,444,000	1,106,210,491	99.98
Belanja Modal	221,270,000	218,159,400	98.59
Total Belanja Bruto	8,264,825,000	8,195,270,810	99.16
Pengembalian Belanja	0	26	0
Total Belanja Netto	8,264,825,000	8,195,270,784	99.16

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2025 & 2024

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp1,131,981,277 atau sebesar 16.03% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan oleh :

1. Naiknya realisasi belanja Belanja Pegawai pada tahun 2025.

2. Adanya pagu belanja modal pada tahun 2025.

Perbandingan realisasi belanja TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	6,870,900,893	5,855,163,507	1,015,737,386	17.35
Belanja Barang	1,106,210,491	1,208,126,000	(101,915,509)	(8.44)
Belanja Modal	218,159,400	0	218,159,400	0
Total Belanja	8,195,270,784	7,063,289,507	1,131,981,277	16.03

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai :
Rp.6,870,900,8
93

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Bima per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp6,870,900,893 dan Rp5,855,163,507.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1,015,737,386 atau sebesar 17.35% dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Naiknya belanja tunjangan penghasilan pejabat negara tahun 2025 di Mahkamah Agung RI.
2. Adanya anggaran belanja PPPK pada tahun 2025.

Tabel 11 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2,732,458,480	2,784,318,580	(51,860,100)	(1.86)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	31,058	33,498	(2,440)	(7.28)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	196,952,650	194,687,730	2,264,920	1.16
Belanja Tunj. Anak PNS	49,845,962	55,364,450	(5,518,488)	(9.97)
Belanja Tunj. Struktural PNS	11,160,000	37,880,000	(26,720,000)	(70.54)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	152,950,000	1,847,130,000	(1,694,180,000)	(91.72)
Belanja Tunj. PPh PNS	34,905,575	303,621,140	(268,715,565)	(88.50)
Belanja Tunj. Beras PNS	121,810,440	126,010,800	(4,200,360)	(3.33)
Belanja Uang Makan PNS	379,067,000	383,519,000	(4,452,000)	(1.16)
Beban Tunjangan Umum PNS	44,650,000	24,050,000	20,600,000	85.65
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	87,750,000	98,550,000	(10,800,000)	(10.96)
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	444,113,502	0	444,113,502	0
Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,430,400,000	0	2,430,400,000	0
Belanja Gaji Pokok PPPK	127,116,400	0	127,116,400	0
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,772	0	2,772	0

Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	6,581,280	0	6,581,280	0
Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,085,120	0	2,085,120	0
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	0	0	0
Belanja Tunjangan Beras PPPK	7,531,680	0	7,531,680	0
Belanja Uang Makan PPPK	33,449,000	0	33,449,000	0
Belanja Tunjangan Umum PPPK	8,040,000	0	8,040,000	0
Total Belanja Brutto	6,870,900,919	5,855,165,198	1,015,735,721	17.35
Pengembalian Belanja	26	1,691	(1,665)	(98.46)
Total Belanja Netto	6,870,900,893	5,855,163,507	1,015,737,386	17.35

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
1,106,210,491

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Bima per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp1,106,210,491 dan Rp1,208,126,000.

Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(101,915,509) atau sebesar (8.44)% dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan karena turunnya realisasi Belanja Barang Operasional, Belanja Jasa, dan Belanja Perjalanan Dinas.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	555,489,600	645,344,000	(89,854,400)	(13.92)
Belanja Barang Persediaan	45,531,000	50,515,000	(4,984,000)	(9.87)
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0
Belanja Jasa	58,727,200	56,291,000	2,436,200	4.33
Belanja Pemeliharaan	397,086,090	364,275,000	32,811,090	9.01
Belanja Perjalanan Dinas	48,376,601	91,701,000	(43,324,399)	(47.25)
Total Belanja Brutto	1,106,210,491	1,208,126,000	(101,915,509)	(8.44)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1,106,210,491	1,208,126,000	(101,915,509)	(8.44)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal
: Rp.
218,159,400

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Bima per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp218,159,400 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp218,159,400 dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2024. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2025 terdapat anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Tabel 13 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	218,159,400	0	218,159,400	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Penambahan nilai Gedung & Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	218,159,400	0	218,159,400	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	218,159,400	0	218,159,400	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 701,812

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp701,812 dan Rp1,735,438.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Bima per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 14 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	378,812	1,473,500

Persediaan	323,000	261,938
Total Aset Lancar	701,812	1,735,438

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Tabel 15 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	TA 2025	TA 2024
1.	Uang Tunai di brankas	0	0
2.	Kwitansi UP	0	0
	Jumlah	0	0

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara Kas:
Rp. 0*

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, Kas Lainnya dan Setara Kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 berasal dari setoran pajak yang belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca.

Tabel 16 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	TA 2025	TA 2024
1.	Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

*Belanja
Dibayar
Dimuka
(prepaid) : Rp.
378,812*

Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp378,812 dan Rp1,473,500. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal Neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) pada Pengadilan Agama Bima merupakan pembayaran dimuka atas barang/jasa (sewa Web Hosting CCTV dan aplikasi Canva Pro).

Tabel 17 Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	TA 2025	TA 2024
1.	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	378,812	1,473,500
Jumlah		378,812	1,473,500

C.1.4. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 323,000*

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp323,000 dan Rp261,938. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Barang Konsumsi	323,000	261,938
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Total		323,000	261,938

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan senilai Rp323,000 berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik nomor: 1156/SEK.PA.W22-A4/PL.1.2.7/XII/2025.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap :
Rp.
7,070,200,867

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebesar Rp7,070,200,867 dan Rp7,124,151,872 dengan penurunan sebesar Rp(53,951,005) atau sebesar (0.76)%. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 19 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan
1	Tanah	3,538,955,000	3,538,955,000	0
2	Peralatan dan Mesin	2,624,507,120	3,331,870,125	(707,363,005)
3	Gedung dan Bangunan	4,224,343,200	4,224,343,200	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan		0	0
5	Aset Tetap Lainnya	5,348,929	5,348,929	0
	Jumlah	10,393,154,249	11,100,517,254	(707,363,005)
	Akumulasi Penyusutan	(3,322,953,382)	(3,976,365,382)	653,412,000
	Nilai Buku Aset Tetap	7,070,200,867	7,124,151,872	(53,951,005)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp.
3.538.955.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.538.955.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 20 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	1.268 M ²	HAK PAKAI 01 / BG 661984	Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI	Pengadilan Agama Bima	2,915,287,000
2.	1	920 M ²	HAK PAKAI 01 / BG 661983	Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI	Pengadilan Agama Bima	623,668,000
		Jumlah				3.538.955.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah tidak mengalami perubahan per 31 Desember Tahun Anggaran 2025. Tidak ada penambahan aset tanah baru bagi Kantor Pengadilan Agama Bima. Seperti yang telah tertera di tabel, rincian tanah sebagai berikut:

1. Tanah untuk Bangunan Kantor dengan luas 1.268 M2 No. sertifikat HAK PAKAI 01 / BG 661984 Atas Nama Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI peruntukan Pengadilan Agama Bima senilai Rp2,915,287,000.
2. Tanah untuk Rumah Dinas dengan luas 920 M2 No. sertifikat HAK PAKAI 01/ BG 661983 Atas Nama Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI peruntukan Pengadilan Agama Bima senilai Rp623,668,000.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
2,624,507,120*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2,624,507,120 dan Rp3,331,870,125. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	3,331,870,125
Mutasi Tambah	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	218,159,400
Transfer Masuk Peralatan dan Mesin	24,919,500
Mutasi Kurang	
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(950,441,905)
Saldo per 31 Desember 2025	2,624,507,120
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(2,298,039,538)
Nilai Buku 31 Desember 2025	326,467,582

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar sebesar Rp(707,363,005) dengan rincian :

1. Mutasi tambah berupa Belanja Modal peralatan dan mesin senilai Rp218,159,400 dengan rincian :
 - 5 (lima) buah A.C Split senilai Rp52,170,000.
 - 2 (dua) buah meja sidang senilai Rp59,052,000.
 - 10 (sepuluh) buah kursi tunggu sidang senilai Rp81,030,000.
 - 6 (enam) buah kursi sidang senilai Rp25,907,400.
2. Mutasi tambah berupa Transfer Masuk peralatan dan mesin berupa 1 (satu) buah scanner senilai Rp24,919,500.

3. Mutasi kurang berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan senilai Rp(950,441,905).

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
4,224,343,200*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4,224,343,200 dan Rp4,224,343,200.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	4,224,343,200
Mutasi Tambah :	
Mutasi Kurang :	
Saldo per 31 Desember 2025	4,224,343,200
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(1,024,913,844)
Nilai Buku 31 Desember 2025	3,199,429,356

Tidak terdapat perubahan nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp. 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	0

Tidak terdapat perubahan nilai Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp.
5,348,929*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp5,348,929 dan Rp5,348,929.

Nilai perolehan Aset tetap Lainnya tidak mengalami perubahan per 31 Desember 2025 dan 2024. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	5,348,929
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2025	5,348,929
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	5,348,929

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
(3,322,953,382)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp(3,322,953,382) dan Rp(3,976,365,382).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 21 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	3,538,955,000	0	3,538,955,000
2	Peralatan dan Mesin	2,624,507,120	(2,298,039,538)	326,467,582
3	Gedung dan Bangunan	4,224,343,200	(1,024,913,844)	3,199,429,356
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	5,348,929	0	5,348,929
Jumlah		10,393,154,249	(3,322,953,382)	7,070,200,867

Aset Lainnya:
Rp. 1,000,000

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1,000,000 dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 22 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Aset Tak Berwujud	12,100,000	12,100,000
2	Aset Lain-Lain	950,441,905	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	962,541,905	12,100,000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(961,541,905)	(12,100,000)
	Nilai buku Aset Lainnya	1,000,000	0

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud :
Rp. 12,100,000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp12,100,000 dan Rp12,100,000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Software IT Kantor Pengadilan Agama Bima	12.100.000
Jumlah Total		12.100.000

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Bima berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor Pengadilan Agama Bima. Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2025.

C.3.2 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain:
Rp. 950,441,905

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp950,441,905 dan Rp0. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun rincian ATB per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	950,441,905
Jumlah Total		950,441,905

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp919,692,864

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp919,692,864 dan Rp588,490. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang di harapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan berupa Utang kepada pihak ketiga.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Bima per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 25 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Utang Kepada Pihak Ketiga	919,692,864	588,490
Utang Yang Belum Ditagihkan	0	0
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	919,692,864	588,490

Utang kepada pihak ketiga senilai Rp925,432,836 berupa:

1. Belanja Barang berupa Tagihan Listrik Bulan Desember 2025 senilai Rp.10,676,447,-
2. Belanja Barang berupa Tagihan Telepon Bulan Desember 2025 Rp.219,000,-
3. Belanja Pegawai berupa Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara Bulan Oktober-Desember 2025 Rp.705,900,000,-
4. Belanja Pegawai berupa Tunjangan PPh Pejabat Negara Bulan Oktober-Desember 2025 Rp. 202,897,417,-

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN:
Rp. 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Cadangan
Piutang:
Rp.
6,152,209,815

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6,152,209,815 dan Rp7,125,298,820. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp.
3,245,448*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3,245,448 dan Rp3,245,448. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 26 Rincian Realisasi PNPB per 31 Desember TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	0	3,245,448	100.00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	3,245,448	0	0
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Total Pendapatan	3,245,448	3,245,448	0

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp.
7,779,329,070*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7,779,329,070 dan Rp5,854,966,136. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 27 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	2,732,096,480	2,784,179,880	(52,083,400)	(1.87)
Beban Pembulatan Gaji PNS	31,058	33,395	(2,337)	(7.00)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(26)	(1,691)	1,665	(98.46)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	196,952,650	194,650,210	2,302,440	1.18
Beban Tunj. Anak PNS	49,838,722	55,361,652	(5,522,930)	(9.98)

Beban Tunj. Struktural PNS	11,160,000	37,880,000	(26,720,000)	(70.54)
Beban Tunj. Fungsional PNS	152,950,000	1,847,130,000	(1,694,180,000)	(91.72)
Beban Tunj. PPh PNS	34,905,575	303,602,890	(268,697,315)	(88.50)
Beban Tunj. Beras PNS	121,810,440	126,010,800	(4,200,360)	(3.33)
Beban Uang Makan PNS	379,067,000	383,519,000	(4,452,000)	(1.16)
Beban Tunjangan Umum PNS	44,650,000	24,050,000	20,600,000	85.65
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	87,750,000	98,550,000	(10,800,000)	(10.96)
Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	647,010,919	0	647,010,919	0
Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	3,136,300,000	0	3,136,300,000	0
Beban Gaji Pokok PPPK	127,116,400	0	127,116,400	0
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,772	0	2,772	0
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	6,581,280	0	6,581,280	0
Beban Tunjangan Anak PPPK	2,085,120	0	2,085,120	0
Beban Tunjangan Beras PPPK	7,531,680	0	7,531,680	0
Beban Uang Makan PPPK	33,449,000	0	33,449,000	0
Beban Tunjangan Umum PPPK	8,040,000	0	8,040,000	0
Total Beban Pegawai	7,779,329,070	5,854,966,136	1,924,362,934	32.87

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp.
45,469,938*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp45,469,938 dan Rp50,803,062. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	45,469,938	50,803,062	(5,333,124)	(10.50)
Total Beban Persediaan	45,469,938	50,803,062	(5,333,124)	(10.50)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa : Rp.
626,987,685*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp626,987,685 dan Rp700,144,800. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	482,407,600	577,379,000	(94,971,400)	(16.45)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	219,000	6,000,000	(5,781,000)	(96.35)
Beban Honor Operasional Satker	63,120,000	47,940,000	15,180,000	31.66
Beban Barang Operasional lainnya	10,455,000	13,050,000	(2,595,000)	(19.89)
Belanja Bahan	300,000	0	300,000	0
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0	700,000	0
Beban Langganan Listrik	10,676,447	0	10,676,447	0
Beban Langganan Telepon	2,672,400	2,883,300	(210,900)	(7.31)
Beban Sewa	56,437,238	52,892,500	3,544,738	6.70
Total Beban Barang dan Jasa	626,987,685	700,144,800	(73,157,115)	(10.45)

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.
397,086,090*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp397,086,090 dan Rp364,275,000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	212,482,590	160,295,000	52,187,590	32.56
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	20,783,800	20,800,000	(16,200)	(0.08)

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	163,819,700	183,180,000	(19,360,300)	(10.57)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	397,086,090	364,275,000	32,811,090	(9.01)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
48,376,601*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp48,376,601 dan Rp91,701,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	48,376,601	91,701,000	(43,324,399)	(47.25)
Total Beban Perjalanan Dinas	48,376,601	91,701,000	(43,324,399)	(47.25)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
-	-	-	-	-
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp. 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 33 Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
-	-	-	-	-
Total Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp.
296,029,905*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp296,029,905 dan Rp260,918,562. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 34 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	194,344,693	160,233,350	34,111,343	21.29
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	100,685,212	100,685,212	0	0.00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,000,000	0	1,000,000	0.00

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0.00
Jumlah Penyusutan	296,029,905	260,918,562	35,111,343	13.46
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0.00
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0.00
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	296,029,905	260,918,562	35,111,343	13.46

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp. 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 35 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
-	-	-	-	-
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp. 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 36 Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
-	-	-	-	-
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Kegiatan Non
Operasional :
Rp. 151*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp151 dan Rp60. Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 37 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	151	60	91	151.67
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	151	60	91	151.67

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp. 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 38 Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
-	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp. 7,125,298,820 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7,125,298,820 dan Rp7,357,337,873.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Rp. (9,190,033,690) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(9,190,033,690) dan Rp(7,319,563,052). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Nilai Persediaan

Koreksi yang menambah/ mengurangi : Rp. 0 Koreksi Yang menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.4. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan : Rp.0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 39 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi :
Rp.0*

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.6. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi antar
entitas : Rp.
8,216,944,685*

Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8,216,944,685 dan Rp7,087,523,999. Untuk TA 2025 Transaksi Antar Entitas mengalami kenaikan sebesar 15.94% dibandingkan dengan TA 2024 yakni sebesar Rp1,129,420,686.

E.7. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

*Kenaikan/penu-
runan ekuitas :
Rp.
(973,089,005)*

Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(973,089,005) dan Rp(232,039,053).

Kenaikan/Penurunan Ekuitas pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp(741,049,952) atau sebesar 319.36% dari TA 2024.

E.8. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :
Rp
6,152,209,815*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6,152,209,815 dan Rp7,125,298,820. Nilai Ekuitas Akhir di TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(973,089,005) atau (13.66)% persen dari Ekuitas Akhir TA 2024.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang dapat untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Capaian Output

Dalam rangka mewujudkan belanja yang lebih berkualitas, lebih baik (spending better), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (good governance), telah ditetapkan petunjuk teknis oleh Kementerian Keuangan yang dapat memberikan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini menunjukkan tingkat urgensi dari pelaporan capaian output dalam proses pengelolaan keuangan negara. Output ini akan dapat menjawab pertanyaan utama pelaksanaan keuangan negara yaitu kemana dan untuk apa uang yang telah dikeluarkan. Dengan pelaporan capaian output dapat diketahui apakah program dan kegiatan pemerintah yang telah ditetapkan telah terlaksana dan mencapai sasaran. Hal ini menjadi penting sebagai Langkah antisipasi agar setiap target output dapat tercapai pada akhir periode, serta sebagai langkah evaluasi untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi yaitu (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan. Adapun Fungsi Pengadilan Agama Bima adalah Ketertiban dan Keamanan, dengan sub fungsi Peradilan, dimana setiap satuan kerja tersebut memiliki satu program yaitu Program Program Dukungan Manajemen.

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 pada satuan kerja Pengadilan Agama Bima antara lain sebagai berikut:

Kegiatan/ Rincian Output	Belanja			Keluaran				Ke t
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
Nama Kegiatan : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama								
Layanan Sarana Internal	221,270,000	218,159,400	98.59	23	23	Unit	100.00	
Layanan Umum	700,000	700,000	100.00	1	1	Laporan	100.00	
Layanan Perkantoran	8,042,555,000	7,976,111,410	99.17	1	1	Layanan	100.00	
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	300,000	100.00	1	1	Dokumen	100.00	
TOTAL	8,264,825,000	8,195,270,810	99.16					

F.2.2. Capaian Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Pengadilan Agama Bima tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN).

F.2.3. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada pemeriksaan BPK untuk laporan keuangan Tahun 2025 Pengadilan Agama Bima sehingga tidak ada tindak lanjut temuan BPK.

F.2.4. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual untuk laporan keuangan periode 31 Desember 2025 adalah:

1. Belanja Barang berupa Tagihan Listrik Bulan Desember 2025 senilai Rp.10,676,447,-
2. Belanja Barang berupa Tagihan Telepon Bulan Desember 2025 Rp.219,000,-
3. Belanja Pegawai berupa Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara Bulan Oktober-Desember 2025 Rp.705,900,000,-
4. Belanja Pegawai berupa Tunjangan PPh Pejabat Negara Bulan Oktober-Desember 2025 Rp.202,897,417,-

F.2.5. Uang Muka dari KPPN senilai Rp. 0,-

Pada TA 2025 ini terdapat Saldo Kas sebesar Rp0 yang merupakan Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu yang tidak tercantum dalam TA 2024.

F.2.6. Rekening Operasional

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Bima adalah:

1. Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 307928, BPG 071 PA BIMA 01, Jenis Rekening Virtual Account Nomor 653243079281000, BANK RAKYAT INDONESIA CAB. BIMA dengan Nomor Persetujuan KPPN 000195/071 Tanggal 27 Mei 2021, yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0.

F.2.7. Revisi DIPA

Untuk Periode pelaporan keuangan per 31 Desember Tahun 2025 Pengadilan Agama Bima melakukan 19 (sembilan belas) kali Revisi DIPA, DIPA-005.01.2.307928/2025. Revisi pertama tanggal 13 Januari 2025, revisi kedua tanggal 23 Februari 2025, revisi ketiga tanggal 10 Maret 2025, revisi keempat tanggal 24 Maret 2025, revisi kelima tanggal 21 April 2025, revisi keenam tanggal 8 Mei 2025, revisi ketujuh tanggal 29 Mei 2025, revisi kedelapan tanggal 8 Juli 2025, revisi kesembilan tanggal 23 Juli 2025, revisi kesepuluh tanggal 20 Agustus 2025, revisi kesebelas tanggal 4 September 2025, revisi duabelas tanggal 29 September 2025, revisi ketigabelas tanggal 8 Oktober 2025, revisi keempatbelas tanggal 24 Oktober 2025, revisi kelimabelas tanggal 27 Oktober 2025, revisi keenambelas tanggal 14 November 2025, revisi ketujuhbelas tanggal 18 November 2025, revisi kedelapanbelas tanggal 1 Desember 2025, revisi kesembilabelas tanggal 9 Desember 2025. terkait dengan Pemutakhiran POK dan Revisi Data Halaman III DIPA.

F.2.8. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Untuk Periode pelaporan keuangan per 31 Desember Tahun 2025 terdapat 7 (tujuh) Informasi mengenai Ralat SPM dengan rincian sebagai berikut :

- a. 2 (dua) Ralat SPM karena adanya perubahan akun pada Tunjangan Fungsional PNS (511124) ke Tunjangan Pejabat Negara (511339) dan akun Tunjangan PPh PNS (511125) ke Tunjangan PPh Pejabat Negara (511324) dengan nomor SPM :
 1. 00001A
 2. 00002A
- b. 6 (enam) Ralat SPM karena adanya perubahan akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) ke Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151) dengan nomor SPM :
 1. 00002A
 2. 00006A
 3. 00009A
 4. 00027A
 5. 00036A
 6. 00053A

F.2.9. Catatan Penting Lainnya

Untuk Periode pelaporan keuangan per 31 Desember Tahun 2025 tidak terdapat catatan penting lainnya.

LAPORAN PENDUKUNG

LAMPIRAN A.1

PENYUSUTAN ASET TETAP

LAMPIRAN A.1
RINCIAN PENYUSUTAN ASET TETAP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
131111	TANAH	2,188	3,538,955,000	0	0	0	3,538,955,000
2010101	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GTEMPAT TINGGAL	920	623,668,000	0	0	0	623,668,000
2010104	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	1,268	2,915,287,000	0	0	0	2,915,287,000
132111	PERALATAN DAN MESIN	273	2,624,507,120	(3,052,136,750)	754,097,212	(2,298,039,538)	326,467,582
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	3	487,000,003	(487,000,003)	0	(487,000,003)	0
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	8	141,130,400	(141,130,400)	0	(141,130,400)	0
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	31	113,129,471	(152,468,798)	39,339,327	(113,129,471)	0
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	2	47,500,000	(96,484,624)	51,734,624	(44,750,000)	2,750,000

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
3050201	MEUBELAIR	124	420,384,147	(452,464,648)	164,872,021	(287,592,627)	132,791,520
3050204	ALAT PENDINGIN	24	152,430,000	(155,600,000)	44,906,000	(110,694,000)	41,736,000
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	6	54,500,000	(110,456,374)	61,406,374	(49,050,000)	5,450,000
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	2	10,530,000	(37,502,000)	28,025,000	(9,477,000)	1,053,000
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	1	50,000,000	(35,000,000)	(10,000,000)	(45,000,000)	5,000,000
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	0	0	(80,569,998)	80,569,998	0	0
3060347	SUMBER TENAGA	1	200,000,000	(100,000,000)	(20,000,000)	(120,000,000)	80,000,000
3100101	KOMPUTER JARINGAN	0	0	(17,840,000)	17,840,000	0	0
3100102	PERSONAL KOMPUTER	53	682,407,009	(903,653,686)	234,991,677	(668,662,009)	13,745,000
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	14	122,064,500	(116,034,629)	37,912,191	(78,122,438)	43,942,062
3100204	PERALATAN JARINGAN	4	143,431,590	(165,931,590)	22,500,000	(143,431,590)	0
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	4	4,224,343,200	(924,228,632)	(100,685,212)	(1,024,913,844)	3,199,429,356
4010101	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	0	0	(764,119,680)	764,119,680	0	0
4010113	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	1	87,765,000	(15,487,939)	(2,065,058)	(17,552,997)	70,212,003
4010124	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	1	3,863,963,200	0	(859,499,480)	(859,499,480)	3,004,463,720

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
4010202	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	2	272,615,000	(144,621,013)	(3,240,354)	(147,861,367)	124,753,633
135121	ASET TETAP LAINNYA	51	5,348,929	0	0	0	5,348,929
6010101	BUKU	51	5,348,929	0	0	0	5,348,929
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	268	950,441,905	0	(949,441,905)	(949,441,905)	1,000,000
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	17	39,339,327	0	(39,339,327)	(39,339,327)	0
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	4	57,234,624	0	(57,234,624)	(57,234,624)	0
3050201	MEUBELAIR	130	198,069,901	0	(198,069,901)	(198,069,901)	0
3050204	ALAT PENDINGIN	10	55,340,000	0	(55,340,000)	(55,340,000)	0
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	31	72,306,374	0	(72,306,374)	(72,306,374)	0
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	20	33,131,000	0	(32,131,000)	(32,131,000)	1,000,000
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	3	80,569,998	0	(80,569,998)	(80,569,998)	0
3100101	KOMPUTER JARINGAN	1	17,840,000	0	(17,840,000)	(17,840,000)	0
3100102	PERSONAL KOMPUTER	30	313,838,552	0	(313,838,552)	(313,838,552)	0
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	21	60,272,129	0	(60,272,129)	(60,272,129)	0

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
3100204	PERALATAN JARINGAN	1	22,500,000	0	(22,500,000)	(22,500,000)	0
JUMLAH		2,784	11,343,596,154	(3,976,365,382)	(296,029,905)	(4,272,395,287)	7,071,200,867

Bima, 20 Januari 2026
 Pdt. Kuasa Pengguna Anggaran,
 Plt. Sekretaris,

ASRINUDDIN, S.H., M.H.
 NIP. 197507042000031001

LAMPIRAN A.2

KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

LAMPIRAN A2
DAFTAR KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025

No	URAIAN AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	JUMLAH SD 1 JANUARI 2025	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



Bima, 20 Januari 2026
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretaris.

ASRINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 197507042000031001

LAMPIRAN A.3

HIBAH

LAMPIRAN A3
DAFTAR HIBAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



Bima, 20 Januari 2026
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretaris.

ASRINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 197507042000031001

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA
 Kode dan Nama UAPPAW: (00KD) NUSA TENGGARA BARAT
 Kode dan Nama Eselon I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	V	Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	V	Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	V	Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	V	Ada
2. Neraca Percobaan Akrua	V	Ada
3. Neraca Percobaan Kas	V	Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V	Ada
KESESUAIAN LAPORAN DENGAN SAKTI/ MonSAKTI		
Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak Seharusnya
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan Aplikasi Sakti/Monsakti termasuk perbandingan dengan tahun 2021?	V	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/ MonSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak Seharusnya
1. Nilai "Surplus/ (Defisit)-LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V	Sama
2. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	V	Sama
3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas	V	Sama
PENGECEKAN PADA MonSAKTI		
To Do List	Ada	Tidak Seharusnya
1. Terdapat Pagu Minus per tanggal pelaporan		V Tidak
2. Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		V Tidak
3. Terdapat Persediaan belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V Tidak
4. Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V Tidak
5. Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah dan CaLK)		V Tidak
6. Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V Tidak
7. Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V Tidak
8. Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V Tidak
9. Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V Tidak
10. Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		V Tidak
11. Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V Tidak
12. Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V Tidak

<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah dan CaLK</i>			
Rekon SAKTI-SPAN <i>(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)</i>	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah "TDK RUPIAH" Yang BEDA?		V	Tidak
2. Adakah "TDK COA" Yang BEDA?		V	Tidak
3. Adakah "TDK Detail" Yang BEDA?		V	Tidak
a. Pagu/DIPA		V	Tidak
b. Estimasi PNB		V	Tidak
c. Belanja		V	Tidak
d. Pengembalian Belanja		V	Tidak
e. Pendapatan		V	Tidak
f. Pengembalian Pendapatan		V	Tidak
g. Kas BLU		V	Tidak
h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
i. Kas Hibah		V	Tidak
j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
Rekon Internal	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak

Daftar MonSAKTI		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika Ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2.	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Ada/Tidak
3.	Adakah Neraca Tidak Balance		V	Tidak
4.	Adakah Pagu Minus		V	Tidak
5.	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi		V	Tidak
6.	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2.	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3.	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2.	Akun Penyisihan Piutang (116XXX) dan Akumulasi Penyusutan (137XXX dan 169XXX) bersaldo (K)	V		Ya
3.	Akun Kewajiban (2XXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
4.	Akun Pendapatan (4XXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
5.	Akun Pengembalian Pendapatan (4XXXXX) bersaldo (D)	V		Ya
6.	Akun Belanja/Beban (5XXXXX) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7.	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5XXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Tidak
2.	Terdapat Akun 1111XX hingga 1115XX. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116XX hingga 1119XX, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3.	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4.	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5.	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6.	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7.	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8.	Terdapat Akun 41XXXX/43XXXX (Pendapatan Perpajakan/Hibah)		V	Tidak
9.	Terdapat Akun 421XXX/422XXX/423XXX dan 425XXX KHUSUS BUN		V	Tidak
10.	Terdapat Akun 425XXX Khusus BUN (425143/ 144/ 161/ 162/ 719/ 745/ 772/ 773/ 774/ 815/ 816/ 998)		V	Tidak
11.	Terdapat Akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/ Subsidi/ Hibah/ Lain-lain/ Transfer TAYL)		V	Tidak
12.	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/ Subsidi/ Hibah/ Lain-lain)		V	Tidak
13.	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
Jika Bukan Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat Akun Neraca (1XXXXX dan 2XXXXX) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak

2. Terdapat Akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3. Terdapat Akun 525XXX (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4. Terdapat Akun 537XXX (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		N/A	Ada/Tidak
Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		N/A	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah terdapat akun yang tidak sesuai tusi? Misalnya ada persediaan/ realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/ Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah / Bantuan Sosial		V	Tidak
2. Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya, kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung Uang/Barang/Jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1. Adakah akun 218211 (Hibah Langsung yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		N/A	Ada/Tidak
2. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan Saldo Awal)		N/A	Ada/Tidak
3. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan akun 391133 - Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		N/A	Ya
4. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		N/A	Ya
5. Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung yang Belum Disahkan)?		N/A	Ya
Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		N/A	Ada/Tidak
1. Pengesahan Pendapatan Hibah (424XXX) jika Hibah Uang		N/A	Ya
Transfer Masuk/ Transfer Keluar dan Resiprokal	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MonSAKTI	0		
2. Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurangi TM di Neraca Percobaan)	0		
3. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2. Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		N/A	Ya/Tidak
3. Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di Neraca Percobaan Akrua?		N/A	Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal)		N/A	Ya/Tidak

Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK				
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan dalam CaLK terkait koreksi persediaan serta dicantumkan dalam catatan telaah.		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2.	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5.	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau deposito	V		Ya
6.	Dari kolom perbandingan, adakah kenaikan/ penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7.	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8.	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat pendapatan perpajakan (Kecuali K/L 015)		V	Tidak
2.	Terdapat pendapatan hibah (43XXXX), beban pembayaran kewajiban utang (54XXXX), beban subsidi (55XXXX), beban hibah (56XXXX), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6XXXXX), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		V	Tidak
3.	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4.	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5.	Bandingkan dengan Laporan Operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/ penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6.	Surplus/ defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/ Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2.	Terdapat kenaikan/ penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3.	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Ya
	Contoh: Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				

Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2. Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3. Terdapat pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4. Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5. Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6. Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
7. Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	V		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/ Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		V	Ya/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		N/A	Ya/Tidak
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		N/A	Ya/Tidak
- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		N/A	Ya/Tidak
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		V	Ya/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		N/A	Ya/Tidak
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	V		Ya/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4. Ada Aset Tetap/ Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	V		Ya/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
- Beban Penyusutan/ Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5. Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akual?		V	Ya/Tidak
- Jika ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		N/A	Ya
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat?		V	Ya/Tidak
Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
2. Apakah ada Beban Bansos?		V	Ya/Tidak
Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akual pada Modul GLP (Jika, ada, Karwas dan/atau Memo harus ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akual		V	Ya/Tidak
2. Ada realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		V	Ya/Tidak
- Maka ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akual		N/A	Ya/Tidak
3. Ada akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akual	V		Ya/Tidak
4. Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	V		Ya/Tidak
- Maka ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akual	V		Ya/Tidak
5. Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akual	V		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU			
LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		N/A	Ya
2. Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		N/A	Tidak
3. Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?		N/A	Ya
4. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akual BLU?		N/A	Ya
5. Apakah Nilai SiLPA, SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(Defisit) pada LRA		N/A	Ya

6.	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU?		N/A	Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119XX, 111826, 1133XX, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaL BLU?		N/A	Ya
2.	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		N/A	Ya
3.	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		N/A	Ya
4.	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya
5.	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		N/A	Ya
6.	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		N/A	Ya
7.	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo Akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"



Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

(ASRINUDDIN, S.H., M.H.)

NIP. 197507042000031001

Bima, 20 Januari 2026

Penelaah,

(REZKY PUSPITARANI, S.E., S.H.)

NIP. 199404032020122016

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA BIMA 307928

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:17 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,758,000	3,245,599	1,487,599	185	2,435,000	3,245,508	(810,508)	133
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,758,000	3,245,599	1,487,599	185	2,435,000	3,245,508	(810,508)	133
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,758,000	3,245,599	1,487,599	185	2,435,000	3,245,508	(810,508)	133
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	8,264,825,000	8,195,270,784	(69,554,216)	99	7,124,727,000	7,063,289,507	61,437,493	99
1. Belanja Pegawai	6,937,111,000	6,870,900,893	(66,210,107)	99	5,916,261,000	5,855,163,507	61,097,493	99
2. Belanja Barang	1,106,444,000	1,106,210,491	(233,509)	100	1,208,466,000	1,208,126,000	340,000	100
3. Belanja Modal	221,270,000	218,159,400	(3,110,600)	99	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA BIMA 307928

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:17 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	8,264,825,000	8,195,270,784	(69,554,216)	99	7,124,727,000	7,063,289,507	61,437,493	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

KOTA BIMA, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ASRINUDDIN
NIP. 197507042000031001



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 2300 **NUSA TENGGARA BARAT**
SATUAN KERJA : 307928 **PENGADILAN AGAMA BIMA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 05/05/26 3:19 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,758,000	0	0	0	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	3,245,448	0	3,245,448	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	1,758,000	3,245,448	0	3,245,448	184.61
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	151	0	151	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	151	0	151	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,758,000	3,245,599	0	3,245,599	184.62
	JUMLAH PENDAPATAN	1,758,000	3,245,599	0	3,245,599	184.62

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 2300 **NUSA TENGGARA BARAT**
SATUAN KERJA : 307928 **PENGADILAN AGAMA BIMA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 3:18 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 2:07 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,883,612,000	2,746,355,000	2,732,458,480	0	2,732,458,480	99.49	13,896,520
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	40,000	40,000	31,058	26	31,032	77.58	8,968
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	163,841,000	198,010,000	196,952,650	0	196,952,650	99.47	1,057,350
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	51,896,000	51,896,000	49,845,962	0	49,845,962	96.05	2,050,038
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	37,200,000	11,160,000	11,160,000	0	11,160,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	356,730,000	153,540,000	152,950,000	0	152,950,000	99.62	590,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	105,725,000	35,800,000	34,905,575	0	34,905,575	97.5	894,425
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	127,443,000	121,811,000	121,810,440	0	121,810,440	100	560
511129	Belanja Uang Makan PNS	468,996,000	400,000,000	379,067,000	0	379,067,000	94.77	20,933,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	29,761,000	44,846,000	44,650,000	0	44,650,000	99.56	196,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	86,400,000	87,750,000	87,750,000	0	87,750,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	4,311,644,000	3,851,208,000	3,811,581,165	26	3,811,581,139	98.97	39,626,861
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	140,000,000	457,000,000	444,113,502	0	444,113,502	97.18	12,886,498
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,200,000,000	2,439,048,000	2,430,400,000	0	2,430,400,000	99.65	8,648,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	1,340,000,000	2,896,048,000	2,874,513,502	0	2,874,513,502	99.26	21,534,498
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	127,117,000	127,116,400	0	127,116,400	100	600
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	50,000	2,772	0	2,772	5.54	47,228
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	6,582,000	6,581,280	0	6,581,280	99.99	720
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	2,086,000	2,085,120	0	2,085,120	99.96	880
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	100,000	0	0	0	0	100,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	7,532,000	7,531,680	0	7,531,680	100	320
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	38,348,000	33,449,000	0	33,449,000	87.22	4,899,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	8,040,000	8,040,000	0	8,040,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	189,855,000	184,806,252	0	184,806,252	97.34	5,048,748
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	5,651,644,000	6,937,111,000	6,870,900,919	26	6,870,900,893	99.05	66,210,107
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	636,870,000	481,743,000	481,695,600	0	481,695,600	99.99	47,400
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,000,000	219,000	219,000	0	219,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	63,120,000	63,120,000	63,120,000	0	63,120,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	14,455,000	10,455,000	10,455,000	0	10,455,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 2300 **NUSA TENGGARA BARAT**
SATUAN KERJA : 307928 **PENGADILAN AGAMA BIMA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 3:18 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 2:07 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	720,445,000	555,537,000	555,489,600	0	555,489,600	99.99	47,400
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	700,000	700,000	0	700,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	46,531,000	45,531,000	45,531,000	0	45,531,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	46,531,000	45,531,000	45,531,000	0	45,531,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000	2,675,000	2,672,650	0	2,672,650	99.91	2,350
522141	Belanja Sewa	51,600,000	56,055,000	56,054,550	0	56,054,550	100	450
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	57,600,000	58,730,000	58,727,200	0	58,727,200	100	2,800
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150,295,000	212,510,000	212,482,590	0	212,482,590	99.99	27,410
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	20,800,000	20,800,000	20,783,800	0	20,783,800	99.92	16,200
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	149,750,000	163,913,000	163,819,700	0	163,819,700	99.94	93,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	320,845,000	397,223,000	397,086,090	0	397,086,090	99.97	136,910
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	96,846,000	48,423,000	48,376,601	0	48,376,601	99.9	46,399
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	96,846,000	48,423,000	48,376,601	0	48,376,601	99.9	46,399
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,243,267,000	1,106,444,000	1,106,210,491	0	1,106,210,491	99.98	233,509
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221,270,000	221,270,000	218,159,400	0	218,159,400	98.59	3,110,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	221,270,000	221,270,000	218,159,400	0	218,159,400	98.59	3,110,600
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	221,270,000	221,270,000	218,159,400	0	218,159,400	98.59	3,110,600
	JUMLAH BELANJA	7,116,181,000	8,264,825,000	8,195,270,810	26	8,195,270,784	99.16	69,554,216

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:17 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	378,812	1,473,500	(1,094,688)	(74.29)
Persediaan	323,000	261,938	61,062	23.31
JUMLAH ASET LANCAR	701,812	1,735,438	(1,033,626)	(59.56)
ASET TETAP				
Tanah	3,538,955,000	3,538,955,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,624,507,120	3,331,870,125	(707,363,005)	(21.23)
Gedung dan Bangunan	4,224,343,200	4,224,343,200	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	5,348,929	5,348,929	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,322,953,382)	(3,976,365,382)	653,412,000	(16.43)
JUMLAH ASET TETAP	7,070,200,867	7,124,151,872	(53,951,005)	(0.76)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	12,100,000	12,100,000	0	0.00
Aset Lain-lain	950,441,905	0	950,441,905	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(961,541,905)	(12,100,000)	(949,441,905)	7,846.63
JUMLAH ASET LAINNYA	1,000,000	0	1,000,000	
JUMLAH ASET	7,071,902,679	7,125,887,310	(53,984,631)	(0.76)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	919,692,864	588,490	919,104,374	156,180.12
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	919,692,864	588,490	919,104,374	156,180.12
JUMLAH KEWAJIBAN	919,692,864	588,490	919,104,374	156,180.12
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	6,152,209,815	7,125,298,820	(973,089,005)	(13.66)
JUMLAH EKUITAS	6,152,209,815	7,125,298,820	(973,089,005)	(13.66)
JUMLAH EKUITAS	6,152,209,815	7,125,298,820	(973,089,005)	(13.66)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,071,902,679	7,125,887,310	(53,984,631)	(0.76)

Keterangan :

FINAL

KOTA BIMA, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ASRINUDDIN

NIP.197507042000031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:16 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,245,448	3,245,448	0	0
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,245,448	3,245,448	0	0
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,245,448	3,245,448	0	0
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	7,779,329,070	5,854,966,136	1,924,362,934	32.867
Beban Persediaan	45,469,938	50,803,062	(5,333,124)	(10.498)
Beban Barang dan Jasa	626,987,685	700,144,800	(73,157,115)	(10.449)
Beban Pemeliharaan	397,086,090	364,275,000	32,811,090	9.007
Beban Perjalanan Dinas	48,376,601	91,701,000	(43,324,399)	(47.245)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:16 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	296,029,905	260,918,562	35,111,343	13.457
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	9,193,279,289	7,322,808,560	1,870,470,729	25.543
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(9,190,033,841)	(7,319,563,112)	(1,870,470,729)	25.554
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	151	60	91	151.667
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	151	60	91	151.667
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	151	60	91	151.667
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9,190,033,690)	(7,319,563,052)	(1,870,470,638)	25.554
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(9,190,033,690)	(7,319,563,052)	(1,870,470,638)	25.554

Keterangan :
FINAL

KOTA BIMA, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ASRINUDDIN
NIP.197507042000031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:16 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,125,298,820	7,357,337,873	(232,039,053)	(3.15)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9,190,033,690)	(7,319,563,052)	(1,870,470,638)	25.55
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	8,216,944,685	7,087,523,999	1,129,420,686	15.94
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(973,089,005)	(232,039,053)	(741,049,952)	319.36
EKUITAS AKHIR	6,152,209,815	7,125,298,820	(973,089,005)	(13.66)

Keterangan :

FINAL

KOTA BIMA, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ASRINUDDIN

NIP 197507042000031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:18 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	378,812	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	323,000	0
0.0	131111	Tanah	3,538,955,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,624,507,120	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,224,343,200	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	5,348,929	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,298,039,538
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,024,913,844
0.0	162151	Software	12,100,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	950,441,905	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	949,441,905
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	12,100,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	908,797,417
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	10,895,447
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	8,195,270,784
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,245,599	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	24,919,500
0.0	391111	Ekuitas	0	7,125,298,820
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	3,245,448
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	151
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,732,096,480	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	31,032	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	196,952,650	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	49,838,722	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	11,160,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	152,950,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	34,905,575	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	121,810,440	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	379,067,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	44,650,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	87,750,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	647,010,919	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	3,136,300,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	127,116,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,772	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	6,581,280	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,085,120	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:18 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	7,531,680	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	33,449,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	8,040,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	482,407,600	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	219,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	63,120,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	10,455,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	10,676,447	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,672,400	0
3.0	522141	Beban Sewa	56,437,238	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	212,482,590	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	20,783,800	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	163,819,700	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	48,376,601	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	194,344,693	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	100,685,212	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,000,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	45,469,938	0
JUMLAH			20,552,922,854	20,552,922,854

Keterangan :

FINAL

KOTA BIMA, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ASRINUDDIN

NIP.197507042000031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:18 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	8,195,270,784
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	3,245,599	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	3,245,448
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	151
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,732,458,480	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31,058	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	196,952,650	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	49,845,962	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	11,160,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	152,950,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	34,905,575	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	121,810,440	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	379,067,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	44,650,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	87,750,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	444,113,502	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,430,400,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	127,116,400	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,772	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	6,581,280	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,085,120	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7,531,680	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	33,449,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	8,040,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	481,695,600	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	219,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	63,120,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	10,455,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	300,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	45,531,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,672,650	0
3.0	522141	Belanja Sewa	56,054,550	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	212,482,590	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	20,783,800	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	163,819,700	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48,376,601	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	218,159,400	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:18 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	26
JUMLAH			8,198,516,409	8,198,516,409

Keterangan :
FINAL

KOTA BIMA, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ASRINUDDIN
197507042000031001



**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307928 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl.Data : 05/05/26 12:37 PM
Tgl.Cetak : 05/05/26 3:19 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	323,000
131111	Tanah	3,538,955,000
132111	Peralatan dan Mesin	2,624,507,120
133111	Gedung dan Bangunan	4,224,343,200
135121	Aset Tetap Lainnya	5,348,929
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2,298,039,538)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,024,913,844)
162151	Software	12,100,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	950,441,905
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(949,441,905)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(12,100,000)
J U M L A H		7,071,523,867

KOTA BIMA, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

ASRINUDDIN
197507042000031001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307928 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tanggal : 05/05/26 3:20 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	261,938
131111	Tanah	3,538,955,000
132111	Peralatan dan Mesin	3,331,870,125
133111	Gedung dan Bangunan	4,224,343,200
135121	Aset Tetap Lainnya	5,348,929
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,052,136,750)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(924,228,632)
162151	Software	12,100,000
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(12,100,000)
J U M L A H		7,124,413,810

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307928 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:20 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		2,188	3,538,955,000	1,268	2,915,287,000	1,268	2,915,287,000	2,188	3,538,955,000
20101	TANAH PERSIL	-	2,188	3,538,955,000	1,268	2,915,287,000	1,268	2,915,287,000	2,188	3,538,955,000
132111	Peralatan dan Mesin		517	3,331,870,125	24	243,078,900	268	950,441,905	273	2,624,507,120
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	11	628,130,403	0	0	0	0	11	628,130,403
30501	ALAT KANTOR	-	54	257,203,422	0	0	21	96,573,951	33	160,629,471
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	302	734,871,022	23	218,159,400	171	325,716,275	154	627,314,147
30601	ALAT STUDIO	-	23	93,661,000	0	0	20	33,131,000	3	60,530,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	3	80,569,998	0	0	3	80,569,998	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	200,000,000	0	0	0	0	1	200,000,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	84	1,014,085,561	0	0	31	331,678,552	53	682,407,009
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	39	323,348,719	1	24,919,500	22	82,772,129	18	265,496,090
133111	Gedung dan Bangunan		4	4,224,343,200	1	3,863,963,200	1	3,863,963,200	4	4,224,343,200
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	2	3,951,728,200	1	3,863,963,200	1	3,863,963,200	2	3,951,728,200
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	2	272,615,000	0	0	0	0	2	272,615,000
135121	Aset Tetap Lainnya		51	5,348,929	0	0	0	0	51	5,348,929
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	51	5,348,929	0	0	0	0	51	5,348,929
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	268	950,441,905	0	0	268	950,441,905
30501	ALAT KANTOR	-	0	0	21	96,573,951	0	0	21	96,573,951
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	171	325,716,275	0	0	171	325,716,275
30601	ALAT STUDIO	-	0	0	20	33,131,000	0	0	20	33,131,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	0	0	3	80,569,998	0	0	3	80,569,998
31001	KOMPUTER UNIT	-	0	0	31	331,678,552	0	0	31	331,678,552
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	0	0	22	82,772,129	0	0	22	82,772,129
TOTAL				11,100,517,254		7,972,771,005		7,729,692,105		11,343,596,154

KOTA BIMA, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

ASRINUDDIN
107507042000031001

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307928 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED								
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN					NILAI BUKU	
					SALDO AWAL		MUTASI PENYUSUTAN		TOTAL		
1	2	3	4	5	6		7		8=6+7	9=5-8	
132111	Peralatan dan Mesin		58	19,486,700	1	700,000		25	5,000,800	34	15,185,900
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	54	19,458,100	0	0		21	4,972,200	33	14,485,900
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	4	28,600	1	700,000		4	28,600	1	700,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	25	5,000,800		0	0	25	5,000,800
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	21	4,972,200		0	0	21	4,972,200
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	0	0	4	28,600		0	0	4	28,600
TOTAL				19,486,700		5,700,800			5,000,800		20,186,700

KOTA BIMA, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

ASRINUDDIN
107507042000031001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307928 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		2,188	3,538,955,000	1,268	2,915,287,000	1,268	2,915,287,000	2,188	3,538,955,000
20101	TANAH PERSIL	-	2,188	3,538,955,000	1,268	2,915,287,000	1,268	2,915,287,000	2,188	3,538,955,000
132111	Peralatan dan Mesin		575	3,351,356,825	25	243,778,900	293	955,442,705	307	2,639,693,020
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	11	628,130,403	0	0	0	0	11	628,130,403
30501	ALAT KANTOR	-	54	257,203,422	0	0	21	96,573,951	33	160,629,471
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	356	754,329,122	23	218,159,400	192	330,688,475	187	641,800,047
30601	ALAT STUDIO	-	23	93,661,000	0	0	20	33,131,000	3	60,530,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	3	80,569,998	0	0	3	80,569,998	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	200,000,000	0	0	0	0	1	200,000,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	84	1,014,085,561	0	0	31	331,678,552	53	682,407,009
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	43	323,377,319	2	25,619,500	26	82,800,729	19	266,196,090
133111	Gedung dan Bangunan		4	4,224,343,200	1	3,863,963,200	1	3,863,963,200	4	4,224,343,200
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	2	3,951,728,200	1	3,863,963,200	1	3,863,963,200	2	3,951,728,200
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	2	272,615,000	0	0	0	0	2	272,615,000
135121	Aset Tetap Lainnya		51	5,348,929	0	0	0	0	51	5,348,929
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	51	5,348,929	0	0	0	0	51	5,348,929
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	293	955,442,705	0	0	293	955,442,705
30501	ALAT KANTOR	-	0	0	21	96,573,951	0	0	21	96,573,951
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	192	330,688,475	0	0	192	330,688,475
30601	ALAT STUDIO	-	0	0	20	33,131,000	0	0	20	33,131,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	0	0	3	80,569,998	0	0	3	80,569,998
31001	KOMPUTER UNIT	-	0	0	31	331,678,552	0	0	31	331,678,552
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	0	0	26	82,800,729	0	0	26	82,800,729
TOTAL				11,120,003,954		7,978,471,805		7,734,692,905		11,363,782,854

KOTA BIMA, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

ASRINUDDIN
197507042000031001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307928 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		2,188	3,538,955,000	0	0	0	3,538,955,000
20101	TANAH PERSIL	-	2,188	3,538,955,000	0	0	0	3,538,955,000
132111	Peralatan dan Mesin		273	2,624,507,120	(3,052,136,750)	754,097,212	(2,298,039,538)	326,467,582
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	11	628,130,403	(628,130,403)	0	(628,130,403)	0
30501	ALAT KANTOR	-	33	160,629,471	(248,953,422)	91,073,951	(157,879,471)	2,750,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	154	627,314,147	(718,521,022)	271,184,395	(447,336,627)	179,977,520
30601	ALAT STUDIO	-	3	60,530,000	(72,502,000)	18,025,000	(54,477,000)	6,053,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	0	0	(80,569,998)	80,569,998	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	200,000,000	(100,000,000)	(20,000,000)	(120,000,000)	80,000,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	53	682,407,009	(921,493,686)	252,831,677	(668,662,009)	13,745,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	18	265,496,090	(281,966,219)	60,412,191	(221,554,028)	43,942,062
133111	Gedung dan Bangunan		4	4,224,343,200	(924,228,632)	(100,685,212)	(1,024,913,844)	3,199,429,356
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	2	3,951,728,200	(779,607,619)	(97,444,858)	(877,052,477)	3,074,675,723
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	2	272,615,000	(144,621,013)	(3,240,354)	(147,861,367)	124,753,633
135121	Aset Tetap Lainnya		51	5,348,929	0	0	0	5,348,929
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	51	5,348,929	0	0	0	5,348,929
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		268	950,441,905	0	(949,441,905)	(949,441,905)	1,000,000
30501	ALAT KANTOR	-	21	96,573,951	0	(96,573,951)	(96,573,951)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	171	325,716,275	0	(325,716,275)	(325,716,275)	0
30601	ALAT STUDIO	-	20	33,131,000	0	(32,131,000)	(32,131,000)	1,000,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	3	80,569,998	0	(80,569,998)	(80,569,998)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	31	331,678,552	0	(331,678,552)	(331,678,552)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	22	82,772,129	0	(82,772,129)	(82,772,129)	0
JUMLAH			2,784	11,343,596,154	(3,976,365,382)	(296,029,905)	(4,272,395,287)	7,071,200,867

KOTA BIMA, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

ASRINUDDIN
197507042000031001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307928 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:22 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		34	15,185,900	(15,449,660)	3,480,120	(11,969,540)	3,216,360
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	33	14,485,900	(15,421,060)	3,626,520	(11,794,540)	2,691,360
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	1	700,000	(28,600)	(146,400)	(175,000)	525,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		25	5,000,800	0	(5,000,800)	(5,000,800)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	21	4,972,200	0	(4,972,200)	(4,972,200)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	4	28,600	0	(28,600)	(28,600)	0
JUMLAH			59	20,186,700	(15,449,660)	(1,520,680)	(16,970,340)	3,216,360

KOTA BIMA, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

ASRINUDDIN
197507042000031001

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307928 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM
Tanggal : 05/05/26 3:23 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	7,000
1010301004	Penghapus/Korektor	10,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	50,000
1010301010	Alat Perekat	51,000
1010301012	Staples	99,000
1010301013	Isi Staples	6,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	100,000
Jumlah Barang Konsumsi		323,000
TOTAL		323,000

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp.
- 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp.
- 0 dalam kondisi usang.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KPPN BIMA

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 307928 - PENGADILAN AGAMA BIMA
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 04/02/26 2:25

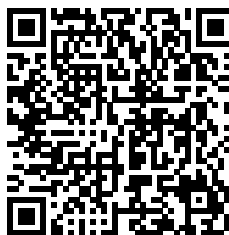
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	8,264,825,000	8,264,825,000	0
2	Belanja	8,195,270,810	8,195,270,810	0
3	Pengembalian Belanja	-26	-26	0
4	Estimasi Pendapatan	1,758,000	1,758,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,245,599	3,245,599	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)

BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

PENGADILAN AGAMA BIMA (307928)

Rekening Induk : RKK BUA MA OPS (032901xxxxxx304)

Virtual Account : 653243079281000 | BENDAHARA PENGELUARAN PENGADILAN AGAMA BIMA

Periode : 01-12-2025 s/d 31-12-2025

[illegible]

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-12-08	09:18:33	47909483	From 032901003295305 to 653243079281000 Pembayaran belanja barang berupa honorarium Pengelola Keuangan bulan Desember 2025, berdasarkan Sura 259991311287747000001	41.467.000,00	0,00	4.876.500,00	46.343.500,00	SPAN	
2025-12-09	10:21:52	47978180	From 653243079281000 to 007901070643506 VA653243079281000Honor KPA Des	46.343.500,00	1.317.500,00	0,00	45.026.000,00	CMS	
2025-12-09	10:21:52	47978181	From 653243079281000 to 008401290148509 VA653243079281000staf keu des	45.026.000,00	370.500,00	0,00	44.655.500,00	CMS	
2025-12-09	10:21:52	47978182	From 653243079281000 to 441801012027536 VA653243079281000Honor bnd. Penerimaan	44.655.500,00	300.000,00	0,00	44.355.500,00	CMS	
2025-12-09	10:21:52	47978183	From 653243079281000 to 007901051366509 VA653243079281000Honor Bendahara des	44.355.500,00	494.000,00	0,00	43.861.500,00	CMS	
2025-12-09	10:21:54	47978184	From 653243079281000 to 007901037151508 VA653243079281000Honor PPK Des	43.861.500,00	1.434.500,00	0,00	42.427.000,00	CMS	
2025-12-09	10:21:54	47978185	From 653243079281000 to 091101009660501 VA653243079281000honor PPABP des	42.427.000,00	390.000,00	0,00	42.037.000,00	CMS	
2025-12-09	10:21:54	47978186	From 653243079281000 to 304101004013503 VA653243079281000Honor PPSPM des	42.037.000,00	570.000,00	0,00	41.467.000,00	CMS	
2025-12-17	17:13:39	48411965	From 653243079281000 to 653243079281000 SETORAN_65324_3079281000 653243079281000 dari 653243079281000	41.467.000,00	0,00	4.408.000,00	45.875.000,00	BRIVA	
2025-12-18	07:23:18	48425431	From 653243079281000 to 005201047387501 VA653243079281000Trh Nov	45.875.000,00	1.160.000,00	0,00	44.715.000,00	CMS	
2025-12-18	07:23:18	48425432	From 653243079281000 to 015701088814501 VA653243079281000Trh Nov	44.715.000,00	986.000,00	0,00	43.729.000,00	CMS	
2025-12-18	07:23:18	48425433	From 653243079281000 to 464601003066532 VA653243079281000Trh Nov	43.729.000,00	1.160.000,00	0,00	42.569.000,00	CMS	
2025-12-18	07:24:46	48425478	From 653243079281000 to 037201502362606 trh Nov	42.569.000,00	1.102.000,00	0,00	41.467.000,00	CMS	
2025-12-30	08:57:56	49126368	From 653243079281000 to 007901051366509 VA653243079281000Uang Makan Des PPPK	41.467.000,00	8.263.000,00	0,00	33.204.000,00	CMS	
2025-12-30	08:57:56	49126370	From 653243079281000 to 007901051366509 VA653243079281000Uang Makan Desember peg	33.204.000,00	23.394.000,00	0,00	9.810.000,00	CMS	
2025-12-30	09:01:56	49127271	From 653243079281000 to 037201406898602 Uang Makan Desember Peg BSI	9.810.000,00	9.810.000,00	0,00	0,00	CMS	
			Total Mutasi		88.726.000,00	88.726.000,00			
			Saldo Akhir				0,00		

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **(005) MAHKAMAH AGUNG RI**
 Eselon I : **(01) Badan Urusan Administrasi**
 Wilayah : **(2300) Nusa Tenggara Barat**
 Satuan Kerja : **(307928) Pengadilan Agama Bima**
 No. Dokumen : **001/MP/307928/XII/2025 - 002/MP/307928/XII/2025**
 Tanggal : **31 Desember 2025**
 Tahun Anggaran : **2025**
 Keterangan : **Jurnal Akrual atas Belanja Barang Dibayar Dimuka**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☒ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	(114112) Belanja Barang yang dibayar di muka	263,000	-
	K	(521111) Belanja Keperluan Perkantoran	-	263,000
2	D	(114112) Belanja Barang yang dibayar di muka	115,812	-
	K	(522141) Belanja Sewa	-	115,812

Uraian :

- Jurnal Akrual atas Belanja Lisensi Aplikasi Canva Pro selama 1 tahun
- Jurnal Akrual atas Belanja Langganan Web Hosting CCTV selama 1 tahun

Diisi oleh :
 Tanggal : 31/12/2025
 Kasubbag Keuangan

ASRINUDDIN, S.H., M.H.



Disetujui oleh :
 Tanggal : 31/12/2025
 Plt. Sekretaris

ASRINUDDIN, S.H., M.H.

Direkam oleh :
 Tanggal : 31/12/2025
 Operator Aklap

REZKY PUSPITARANI, S.E., S.H.

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **(005) MAHKAMAH AGUNG RI**
 Eselon I : **(01) Badan Urusan Administrasi**
 Wilayah : **(2300) Nusa Tenggara Barat**
 Satuan Kerja : **(307928) Pengadilan Agama Bima**
 No. Dokumen : **003/MP/307928/XII/2025 - 004/MP/307928/XII/2025**
 Tanggal : **31 Desember 2025**
 Tahun Anggaran : **2025**
 Keterangan : **Jurnal Akrual atas Belanja Barang**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	(522111) Belanja Langganan Listrik	10,676,447	-
	K	(212112) Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	-	10,676,447
2	D	(522112) Belanja Langganan Telepon	219,000	-
	K	(212112) Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	-	219,000

Uraian :

- Jurnal Akrual atas Beban Langganan Listrik Bulan Desember 2025
- Jurnal Akrual atas Beban Langganan Telepon Bulan Desember 2025

Diisi oleh :

Tanggal : 31/12/2025

Kasubbag Keuangan

ASRINUDDIN, S.H., M.H.

Disetujui oleh :

Tanggal : 31/12/2025

Plt. Sekretaris



ASRINUDDIN, S.H., M.H.

Direkam oleh :

Tanggal : 31/12/2025

Operator Aklap

REZKY PUSPITARANI, S.E., S.H.

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **(005) MAHKAMAH AGUNG RI**
 Eselon I : **(01) Badan Urusan Administrasi**
 Wilayah : **(2300) Nusa Tenggara Barat**
 Satuan Kerja : **(307928) Pengadilan Agama Bima**
 No. Dokumen : **005/MP/307928/XII/2025**
 Tanggal : **31 Desember 2025**
 Tahun Anggaran : **2025**
 Keterangan : **Jurnal Akruai atas Belanja Pegawai Bulan Oktober-Desember 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	(511339) Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	705,900,000	-
	K	(212111) Belanja pegawai yang masih harus dibayar	-	705,900,000
2	D	(511324) Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	202,897,417	-
	K	(212111) Belanja pegawai yang masih harus dibayar	-	202,897,417

Uraian :

- Jurnal Akruai Kekurangan Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara Bulan Oktober-Desember 2025
- Jurnal Akruai Kekurangan Tunjangan PPh Pejabat Negara Bulan Oktober-Desember 2025

Diisi oleh :

Tanggal : 31/12/2025
Kasubbag Keuangan

ASRINUDDIN, S.H., M.H.



Disetujui oleh :

Tanggal : 31/12/2025
Plt. Sekretaris

ASRINUDDIN, S.H., M.H.

Direkam oleh :

Tanggal : 31/12/2025
Operator Aklap

REZKY PUSPITARANI, S.E., S.H.

**KARTU RINCIAN NILAI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
PER 31 DESEMBER 2025**

KL : (005) MAHKAMAH AGUNG RI
 ES1 : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
 Satuan Kerja : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

No.	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SAKTER	SATKER	TA	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	2300	NUSA TENGGARA BARAT	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	2025	522111	Belanja Langganan Listrik	10,676,447	Nota Tagihan, SPM	Jurnal AkruaI atas beban langganan Listrik Bulan Desember 2025
2	2300	NUSA TENGGARA BARAT	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	2025	522112	Belanja Langganan Telepon	219,000	Nota Tagihan, Kuitansi dan SPBy	Jurnal AkruaI atas beban langganan Telepon Bulan Desember 2025
3	2300	NUSA TENGGARA BARAT	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	2025	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	705,900,000	ADK Gajiweb	Jurnal AkruaI Kekurangan Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara Bulan Oktober-Desember 2025
4	2300	NUSA TENGGARA BARAT	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	2025	511324	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	202,897,417	ADK Gajiweb	Jurnal AkruaI Kekurangan Tunjangan PPh Pejabat Negara Bulan Oktober-Desember 2025
JUMLAH TOTAL								919,692,864		


 31 Desember 2025
 Plt. Sekretaris,
 ASRINUDDIN, S.H., M.H.
 NPA 197307042000031001

**KARTU RINCIAN NILAI BELANJA DIBAYAR DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2025**

KL : (005) MAHKAMAH AGUNG RI
 ES1 : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
 Satuan Kerja : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

No.	Uraian	Nilai SPM/SP2D/SPBy	Masa Berlaku (bulan)	Angsuran perbulan (rupiah)	TMT	Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran	Total Angsuran	Sisa Angsuran	Total Sisa Angsuran	Akun	Jumlah Saldo Akhir
1	Lisensi Aplikasi Canva Pro	789,000	12	65,750	24/4/2025	24/4/2026	8	526,000	4	263,000	521111	263,000
2	Sewa Web Hosting CCTV	1,389,750	12	115,813	6/2/2025	6/2/2026	11	1,273,938	1	115,812	522141	115,812
JUMLAH TOTAL		2,178,750						1,799,938		378,812		378,812

Bima, 31 Desember 2025
 Pkt Sekretaris,

 ASRIHURDIN, S.H., M.H.
 NIP. 197507042000031001



MONITORING CAPAIAN KINERJA

NO	TAHUN ANGGARAN	KODE BA	NAMA KEMENTERIAN	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	NOMOR DIPA	KODE PERIODE	NOMOR REVISI	KODE FUNGSI	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE KRO	KODE RO	URAIAN RO	SATUAN	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	PROGRES CAPAIAN	KETERANGAN	PAGU BELANJA	REALISASI BELANJA	NILAI BELANJA	NILAI BELANJA SP2B	NILAI BELANJA KOREKSI	NILAI BELANJA KOREKSI SP2B	NILAI PEMULHAN PAGU	NILAI BELANJA SP3	PERSEN REALISASI	TGL KIRIM DATA	TGL FLAG OMSPAN	KODE TEMATIK	KODE PRIORITAS NASIONAL	DESKRIPSI KODE PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	DESKRIPSI PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	DESKRIPSI KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	MAJOR PROJECT	PAGU TERAKHIR KHUSUS PERIODE 12	REVISI TERAKHIR KHUSUS PERIODE 12
1	2025	005	MAHKAMAH AGUNG	01	Badan Urusan Administrasi	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	DIPA-005.01.2.307928/2025	2025-12	19	03.04	WA	1071	EBB	951	Layanan Sarana Internal	Unit	23	23	100	program sudah selesai	221.270.000	218159400	218.159.400	0	0	0	0	0	98.59	2026-01-02	2026-01-02	000-2025	00-2025	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2025	Bukan Program Prioritas	00.00-2025	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	221270000	19
2	2025	005	MAHKAMAH AGUNG	01	Badan Urusan Administrasi	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	DIPA-005.01.2.307928/2025	2025-12	19	03.04	WA	6986	EBA	962	Layanan Umum	Laporan	1	1	100	Program sudah selesai	700.000	700000	700.000	0	0	0	0	0	100	2026-01-02	2026-01-02	000-2025	00-2025	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2025	Bukan Program Prioritas	00.00-2025	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	700000	19
3	2025	005	MAHKAMAH AGUNG	01	Badan Urusan Administrasi	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	DIPA-005.01.2.307928/2025	2025-12	19	03.04	WA	6986	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	8.042.555.000	7976111410	6.898.263.243	0	1.077.848.167	0	0	0	99.17	2026-01-02	2026-01-02	000-2025	00-2025	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2025	Bukan Program Prioritas	00.00-2025	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	8042555000	19
4	2025	005	MAHKAMAH AGUNG	01	Badan Urusan Administrasi	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	DIPA-005.01.2.307928/2025	2025-12	19	03.04	WA	6986	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	1	100	sdah selesai	300.000	300000	300.000	0	0	0	0	0	100	2026-01-02	2026-01-02	000-2025	00-2025	Bukan Prioritas Nasional	00.00-2025	Bukan Program Prioritas	00.00-2025	Tidak Ada Informasi	Tidak Ada Informasi	Bukan Major Project	300000	19



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.307928/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 19
Tanggal : 09 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
- 3. Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
- 4. Kode>Nama Satker : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA
- Sebesar : Rp. 8.264.825.000 (DELAPAN MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	8.264.825.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN B I M A (071) Rp. 8.264.825.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

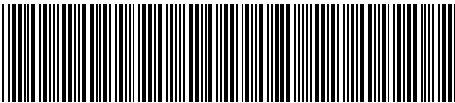
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 005.01.2.307928/2025

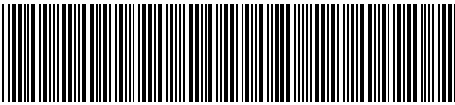


DS:9068-7902-8230-1683

Satker : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	8.264.825.000
WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	221.270.000
WA.6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	8.043.555.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.307928/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:9068-7902-8230-1683

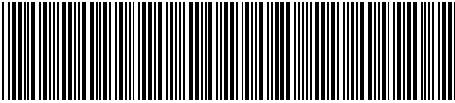
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

							Halaman : I A. 1
Program	:	005.01.WA	Program Dukungan Manajemen				8.264.825.000
Kegiatan	:	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung				221.270.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana pengadilan				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	23,00	Unit, m2, Paket	221.270.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	23.00	Unit	221.270.000
Kegiatan	:	6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama				8.043.555.000
	:						
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	8.043.255.000
Rincian Output	:	01	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Laporan	700.000
		02	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	8.042.555.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	300.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	300.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

ttd.
Dr. SOBANDI, S.H., M.H.
NIP. 196902041996031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.307928/2025
I B. SUMBER DANA



DS:9068-7902-8230-1683

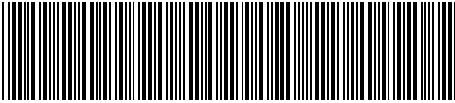
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	8.264.825.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	8.264.825.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.307928/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:9068-7902-8230-1683

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA
Kewenangan : (KD)

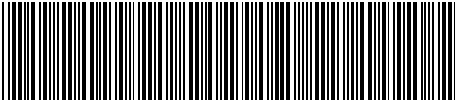
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	6.937.111	1.106.444	221.270	-	-	8.264.825	23 . 06 071 23 . 06 071 23 . 06 071	
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	6.937.111	1.106.444	221.270	-	-	8.264.825		
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	221.270	-	-	221.270		
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (23.06 NUSA TENGGARA BARAT / KAB. DOMPU)	-	-	221.270	-	-	221.270		
01	RM	-	-	221.270	-	-	221.270		
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	6.937.111	1.106.444	-	-	-	8.043.555		
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (23.06 NUSA TENGGARA BARAT / KAB. DOMPU)	6.937.111	1.106.144	-	-	-	8.043.255		
01	RM	6.937.111	1.106.144	-	-	-	8.043.255		
6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (23.06 NUSA TENGGARA BARAT / KAB. DOMPU)	-	300	-	-	-	300		
01	RM	-	300	-	-	-	300		
JUMLAH		6.937.111	1.106.444	221.270	-	-	8.264.825		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

ttd.
Dr. SOBANDI, S.H., M.H.
NIP. 196902041996031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.307928/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:9068-7902-8230-1683

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode/Nama Satker : (307928) PENGADILAN AGAMA BIMA

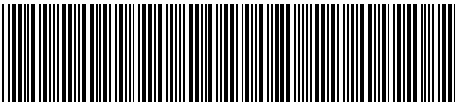
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	488.318	570.254	1.068.014	629.535	672.114	1.235.968	624.375	547.387	563.492	591.874	536.497	736.998	8.264.825
		BELANJA PEGAWAI	450.467	479.032	964.690	481.739	477.957	983.693	490.216	464.335	498.932	498.932	498.932	648.188	6.937.111
		BELANJA BARANG	37.850	91.222	103.324	147.796	141.987	86.286	134.159	83.052	64.560	92.942	37.566	85.699	1.106.444
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	52.170	165.989	0	0	0	0	0	3.111	221.270
		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	0	0	0	52.170	165.989	0	0	0	0	0	3.111	221.270
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	52.170	165.989	0	0	0	0	0	3.111	221.270
		Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	488.318	570.254	1.068.014	629.535	619.944	1.069.978	624.375	547.387	563.492	591.874	536.497	733.887	8.043.555
		51 BELANJA PEGAWAI	450.467	479.032	964.690	481.739	477.957	983.693	490.216	464.335	498.932	498.932	498.932	648.188	6.937.111
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	37.850	91.222	103.324	147.796	141.987	86.286	134.159	83.052	64.560	92.942	37.566	85.699	1.106.444
		PERKIRAAN PENERIMAAN	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	152	1.758
		- PNPB (425131)	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	152	1.758

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

ttd.
Dr. SOBANDI, S.H., M.H.
NIP. 196902041996031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.307928/2025
IV A. B L O K I R



DS:9068-7902-8230-1683

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [23] NUSA TENGGARA BARAT
Kode dan Nama Satker : [307928] PENGADILAN AGAMA BIMA

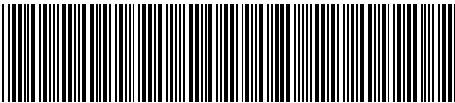
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

ttd.
Dr. SOBANDI, S.H., M.H.
NIP. 196902041996031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.307928/2025
IV B. C A T A T A N



DS:9068-7902-8230-1683

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [23] NUSA TENGGARA BARAT
Kode dan Nama Satker : [307928] PENGADILAN AGAMA BIMA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

ttd.
Dr. SOBANDI, S.H., M.H.
NIP. 196902041996031004